

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN - INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi dan Bisnis Program Strata Satu (S-1) dari mahasiswa :

Nama : Lisa Maria Maholae
NPM : 19530022
Program studi : Ekonomi Pembangunan
Judul skripsi : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, ANGGARAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2000-2021

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademis untuk menempuh Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif guna menyelesaikan studi.

SKRIPSI SARJANA PROGRAM STRATA SATU (S-1)
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

Pembimbing Utama,



(Elvis F. Purba, S.E.,M.Si)



Dekan,



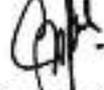
(Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E.,M.Si)

Pembimbing Pendamping



(Nancy Nopeline, SE,M.Si)

Ketua Program Studi



(Nancy Nopeline, SE,M.Si)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kekayaan nyata yang diinginkan oleh suatu Negara pastinya memiliki masyarakat yang berkualitas baik agar terciptanya Negara maju di segala bidang. Penduduk yang banyak dalam suatu negara bukan menjadi ketentuan bahwa perekonomian akan terus meningkat dalam pertumbuhannya. Hal ini didukung dengan Sukirno (2006:11) yaitu “Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan”. Dalam perekonomian suatu negara, pembangunan manusia menjadi tujuan utama agar tercapainya kemakmuran dan kemajuan masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang disertai dengan adanya pembangunan manusia yang mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang baik.

“Pembangunan manusia merupakan kontributor dari stabilnya proses pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan fundamental pembangunan tetapi juga sebagai faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu” Ranis (2006 dalam Ezkirianto 2013 : 14). Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu tujuan yang diutamakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, sedangkan untuk mengukur kemakmuran, kesejahteraan, serta kemajuan masyarakat dalam suatu negara dapat

dilihat dari tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) dimana sudah menjadi parameter internasional untuk melihat sejauh mana negara itu berkembang.

Menurut BPS (2022) bahwa “ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang”.

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dikatakan sejalan dengan indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat. Pembangunan manusia yang meningkat salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari tiga indikator yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Standar hidup adalah indikator yang akan menunjukkan seberapa sejahteranya kehidupan disuatu populasi diukur dari rata-rata pendapatan yang dihasilkan.

Menurut Barki (2021) Pendapatan per kapita sering dijadikan standar untuk melihat kemakmuran di suatu Negara atau disebut dengan sebutan pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara. Pendapatan rata-rata penduduk ini juga merupakan gambaran Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat akan mendorong meningkatnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok.

Kemakmuran hidup masyarakat dalam suatu Negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara masyarakatnya berusaha untuk mendapatkan hidup yang layak dengan kesehatan yang mendukung. Anggaran kesehatan juga menjadi factor penting yang tidak terlepas dari keberhasilan IPM di Indonesia.

Meylina (2013 : 85) berpendapat “Dalam hal anggaran kesehatan didukung dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Dasar nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan bahwa Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia”.

Seiring pembangunan di Indonesia, masalah kesehatan menjadi masalah yang harus ditangani serius dalam tahun-tahun tertentu yang menyebabkan kemungkinan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat dan daerah menjadi lebih besar dibandingkan dengan anggaran kesehatan di tahun sebelumnya yang masih dianggap normal untuk anggaran yang dikeluarkan. Menurut Sabrina (2019) Dalam pembangunan nasional juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Selain itu, pendidikan manusia didalamnya juga menjadi salah satu factor penting dalam meningkatkan Indeks pembangunan manusia (IPM). IPM dari sisi pendidikan dapat diketahui dari rata rata tingkat pendidikan yang dicapai penduduk. Untuk meningkatkan pendidikan diperlukan investasi. Menurut Kayode Asaju (2012) dalam (Dalimunthe, Amri Khairul & Fahmi Anisa 2018:28) bahwa “Dengan melakukan investasi di bidang pendidikan, individu yang terdidik dengan baik akan berhasil meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya di berbagai sektor bidang ekonomi.”

Tabel 1.1. Pendapatan Per kapita, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2000 – 2021.

Tahun	Pendapatan per kapita (Juta rupiah)	Anggaran Pendidikan (Milyar Rp)	Anggaran Kesehatan (Milyar Rp)	Indeks Pembangunan Manusia
2000	64.920,549	6,045,200	829,100	64,98
2001	75.820,83	4,561,500	333,400	65,66
2002	82.766,731	4,699,100	321,400	65,80
2003	90.266.878	5,377,700	402,200	61,00
2004	101.612,84	6,290,100	458,600	68,69
2005	121.250,82	25.988,00	7,038,00	69,57
2006	144.057,54	43,287,00	12,730,00	70,08
2007	168.224,56	54,067,00	17,467,00	70,59
2008	207.983,54	64,029,00	17,270,00	71,17
2009	232.640,60	89,918,00	17,302,00	71,76
2010	281.298,29	84,086,00	18,002,00	66,53
2011	316.946,00	91,483,00	13,649,00	67,09
2012	344.321,47	10,667,00	15,564,00	67,70
2013	376.906,50	11,467,00	17,493,00	68,31
2014	412.508,88	13,134,00	13,078,00	68,90
2015	444.874,18	14,393,00	21,113,00	69,55
2016	473.619,24	150,090,00	67,214,00	70,18
2017	513.795,26	143,134,00	61,724,00	70,81
2018	555.619,55	147,562,00	65,066,00	71,39
2019	587.302,03	152,690,00	62,758,00	71,92
2020	568.066,97	156,894,40	61,148,30	71,94
2021	620.145,86	175,236,50	111,666,70	72,29

Sumber: BPS data diolah tahun 2005-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa data dari pendapatan per kapita, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan setiap tahunnya mengalami perubahan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk pendapatan per kapita yang disajikan pada tabel di tahun 2019 (587.302) dan 2021 (620.145) merupakan nilai tertinggi dari tahun 2000-2021 (dalam juta rupiah) dan pendapatan per kapita dengan nilai terendah berada pada tahun 2000 yaitu (64.920) data pada era tersebut dapat

dikatakan bahwa tahun tersebut merupakan tahun-tahun pemulihan dari krisis finansial Asia dan dengan adanya masa era boom komoditas ditahun selanjutnya Indonesia yang merupakan rumah bagi populasi yang pendapatan per kapitanya dan daya belinya meningkat tajam sepanjang tahun 2000-an karena era boom komoditas yang pada akhirnya menghantarkan Indonesia menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di gempuran ekonomi dunia yang sedang buruk.

Diketahui bahwa pendapatan per kapita pada tahun 2020 menurun sebesar 19,2 juta rupiah dari tahun 2019 yang disebabkan dari tekanan masalah perekonomian pandemi Covid-19 sehingga pendapatan masyarakat menurun. Hal ini juga menjadikan Indonesia negara yang memiliki pendapatan menengah atas.

Dapat dilihat kembali bahwa tahun 2021 pendapatan per kapita di Indonesia merupakan pendapatan dengan nilai tertinggi. Hal tersebut terjadi karena pada tahun yang sama indonesia melakukan pemulihan dalam pertumbuhan ekonomi yang kuat pasca pandemi yang terlewat hingga berdasarkan data pendapatan per kapita yang diperoleh Indonesia masih termasuk kedalam kelompok Negara pendapatan menengah atas terhitung awal pembukaan tahun 2023.

Data anggaran kesehatan menunjukkan dari tahun 2000 hingga 2021 dengan nilai tertinggi yaitu pada tahun 2021 dan nilai terendah di tahun 2002. Anggaran kesehatan dikeluarkan berdasarkan apa yang dibutuhkan dalam mencukupi penggunaannya untuk meningkatkan kesehatan yang lebih baik yang

kemungkinan menyebabkan alokasi anggaran kesehatan yang terjadi tidak akan sama dari tahun ke tahun.

Pada anggaran kesehatan terjadi anggaran yang berfluktuasi dari tahun 2000-2021. Di mulai dari anggaran kesehatan pada tahun 2001 dan 2002 yang menurun dari tahun sebelumnya dimana pengalokasian anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat kemungkinan menjadi tidak stabil dengan penambahan penduduk dan penyaluran anggaran kepada pelayanan kesehatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2008 anggaran kesehatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tidak begitu melonjak. Tetapi pada tahun 2020 anggaran kesehatan mengalami penurunan kembali menjadi 61.148,00 (dalam miliar rupiah) yang seharusnya untuk anggaran kesehatan memerlukan dana yang lebih dalam menangani masalah yang disebabkan oleh adanya suatu kejadian baru yang terjadi di seluruh dunia yaitu pandemic covid-19 dan Indonesia merupakan negara yang terkena dampak kesehatan dalam hal ini.

Sedangkan data pada anggaran pendidikan menunjukkan nilai tertinggi berada pada tahun yang sama dengan anggaran kesehatan di tahun 2021 dan pada tahun 2001 merupakan tahun dengan nilai anggaran pendidikan terendah. Untuk alokasi anggaran, kesehatan dan pendidikan sendiri mendapat perhatian lebih dari APBN dalam rangka memenuhi amanat undang-undang yaitu sebesar 20 % dari anggaran pendapatan & belanja Negara.

Dari data dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan walaupun pada tahun tahun tertentu

anggaran pendidikan mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu dari tahun 2016 (150,090 dalam miliar rupiah) ke tahun 2017 menjadi (143,134 dalam miliar rupiah). Yang menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran yang baik harusnya berdampak pada pembangunan manusia dari sisi pendidikan yang baik pula.

Dilihat dari data yang diuraikan pada tabel dapat diketahui IPM Indonesia dari tahun 2000-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2010 IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun diikuti dengan pendapatan per kapita yang mengalami kenaikan nilai rata-rata yang baik hingga 2021 meskipun pada tahun 2020 pendapatan per kapita menurun dari tahun sebelumnya karena kondisi perekonomian Negara pada saat itu dipengaruhi oleh adanya guncangan pandemic COVID-19 diawal tahun.

Dari data IPM Indonesia terus cenderung meningkat setiap tahunnya dan posisi Indonesia dalam urutan IPM di ASEAN menempati urutan keenam dan termasuk kedalam *Medium Human Development* (UNDP 2015). Namun, IPM di 33 provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan.

Namun disertai dengan penurunan pendapatan per kapita ditahun 2020, IPM pada tahun itu 2020 justru tidak mengalami penurunan karena adanya anggaran pendidikan yang merupakan salah satu indikator yang meningkat. Dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. (BPS 2020)

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas perkembangan IPM Indonesia dan mengaitkannya dengan pendapatan per kapita, anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sehubungan dengan itu penulis mengambil judul : **Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Anggaran Kesehatan dan Anggaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada Tahun 2000-2021.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2000-2021 ?
2. Bagaimanakah pengaruh anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2000-2021 ?
3. Bagaimanakah pengaruh anggaran pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2000-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan per kapita terhadap IPM Indonesia tahun 2000-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran kesehatan terhadap IPM Indonesia tahun 2000-2021.

3. Untuk mengetahui pengaruh anggaran pendidikan terhadap IPM Indonesia tahun 2000-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat seperti :

1. Sebagai bahan bacaan studi, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa Ekonomi pembangunan ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
2. Untuk masyarakat umum,menjadikan tambahan informasi terkait factor-faktor apa saja yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.
3. Bagi pemerintah, sebagai dasar yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan suatu kebijakan dalam memperbaiki maupun meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.5 Indeks Pembangunan Manusia

1.5.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Putra (2008 : 241) IPM atau Indeks Pembangunan Manusia biasa disebut digunakan untuk mengklasifikasikan bagaimana satu negara bergerak menuju negara yang maju atau justru negara tersebut masih tergolong negara berkembang. Hal ini didukung dengan data IPM yang selalu menggambarkan suatu pencapaian dalam pembangunan guna mensejahterakan masyarakat di suatu daerah/negara tertentu. Dari IPM yang diketahui dapat menjelaskan bagaimana hasil pembangunan yang dilihat dari pendapatan, kesehatan, dan pendidikan yang telah dijalankan.

Dengan ditetapkannya tujuan pembangunan, pemerintah melakukan keputusan untuk arah kebijakan pembangunan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu meningkatkan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan lebih memperhatikan daerah atau daerah tertinggal, maka SDM akan semakin berkualitas (Bano, 2019).

Menurut UNDP dalam BPS (2022) :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait

banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Dalam mengetahui kemampuan daya beli seseorang maka dibutuhkan pendapatan rata-rata setiap orang yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam membangun indeks pembangunan manusia di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjadi indikator yang penting untuk di perhatikan dalam sisi pembangunan. Adapun manfaatnya (BPS 2022) :

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk).
- b. IPM dapat menentukan kesejahteraan penduduk daerah yang di rangkum.
- c. IPM merupakan data strategis; sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Harya (2020 : 52) hasil capaian pembangunan manusia dibagikan menjadi 4 kelompok kategori sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Kategori pencapaian IPM diurutkan sebagai berikut :

- a. IPM > 80 : Sangat Tinggi
- b. IPM antara $70 \leq \text{IPM} < 80$: Tinggi
- c. IPM antara $60 \leq \text{IPM} < 70$: Sedang
- d. IPM < 60 : Rendah

Tentunya dengan indeks pembangunan manusia yang semakin baik juga akan meningkatkan kemampuan maupun daya saing yang dimiliki oleh sumber daya manusia, baik melalui keahlian, kemampuan maupun ilmu yang diterima saat mengenyam bangku pendidikan serta semakin baiknya kemauan untuk berusaha karena kesehatan yang dijamin dan diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan juga bisa berjalan beriringan dengan pembangunan manusianya.

1.5.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1995 dalam Syuhada 2019), IPM terdiri dari 3 komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan IPM dengan optimal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

1. Komponen Pendidikan

Dalam indeks pembangunan manusia komponen pendidikan merupakan indeks yang digambarkan oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Jika dilihat dari indikator tingkat pendidikan, apabila tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat rendah maka akan membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan hingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan negara yang dihasilkan.

Menurut BPS perhitungan IPM pada saat ini telah mendapatkan beberapa perubahan seperti indikator angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah, hingga pada PDB per kapita diganti dengan PNB per kapita untuk menggambarkan pendapatan masyarakat pada

suatu wilayah yang lebih relevan digunakan dalam menentukan indeks pembangunan manusia dalam wilayah yang lebih spesifik.

Sumber daya manusia suatu daerah saat itu berkualitas tinggi dapat tercermin dalam pengukuran dimensi pendidikan dan kesehatan. Jadi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk memahami kualitas sumber daya manusia.

2. Komponen Kesehatan

Indeks harapan hidup adalah komponen kesehatan yang merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan (BPS Indonesia).

3. Standar hidup layak

Standar hidup layak umumnya digambarkan sebagai indeks tingkat kemakmuran dari masyarakat yang terdapat dalam suatu negara yang di huni. Menurut UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan pada BPS dalam

menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan rumusan yang di ada.

1.6 Pendapatan per kapita

1.6.1 Pengertian Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan IPM dengan melihat data Produk Domestic Bruto (PDB) untuk menggambarkan potensi di suatu Negara maju maupun Negara berkembang. Angka pendapatan per kapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan.

Sukirno (2006 : 10) mengatakan bahwa pendapatan per kapita selalu digunakan untuk menggambarkan taraf pembangunan ekonomi yang dicapai berbagai negara dan tingkat peerkembangannya dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita dihitung berdasarkan pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara maupun daerah. Manfaat perhitungan pendapatan per kapita sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, pendapatan per kapita dihitung secara berkala, biasanya 1 tahun.

Untuk menghitung pendapatan per kapita adalah menjumlahkan pendapatan keseluruhan penduduk suatu negara pada tahun tertentu. Selanjutnya, dibagi dengan jumlah penduduk negara yang bersangkutan pada periode tahun yang sama. Jika di formulakan pada rumus sebagai berikut :

$$\text{GDP Per Kapita} = \frac{\text{PDB (Product Domestic Bruto)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Menurut Saragih (26 : 2003) Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk mengatasi permasalahan dalam hal keuangan pungutan pemerintah. Data pendapatan per kapita umumnya dilihat dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara. Pendapatan per kapita dalam penelitian ini yaitu jumlah Produk Domestik Bruto Atas Harga Berlaku.

1.6.2 Manfaat pendapatan per kapita

Kemampuan pendapatan per kapita untuk mengukur tingkat kemakmuran sebagai indikator kesejahteraan negara dan kehidupan bernegara berfungsi sebagai salah satu analisis ekonomi bagi pemerintah juga organisasi ekonomi untuk membuat kebijakan ekonomi. Adapun manfaat perhitungan pendapatan per kapita menurut Insyirah (2018 : 22) yaitu :

- a. Membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara satu dengan yang lainnya.
- b. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dengan mengambil dasar pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, dapat di simpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara rendah (bawah), sedang atau tinggi.
- c. Data digunakan informasi untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi.

1.7 Pengertian Anggaran

Penganggaran merupakan bagian terpenting didalam struktur pengelolaan keuangan yang dibutuhkan diberbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, politik dan lain hal. Struktur anggaran yang membuka peluang untuk mencari sumber pendanaan di luar pendapatan daerah mendorong pemerintah daerah tidak cermat dalam penganggarannya. Decky (2014 : 9) menyatakan bahwa “Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan progam-program yang dibiayai dengan uang publik”

Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan (Mardiasmo, 2009 : 62).

Menurut Niskanen (1971, dalam Blais dan Dion, 1990) bahwa agency (satuan kerja di pemerintahan) memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan kebijakan pemerintah khususnya kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk menjalankannya.

1.8 Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan alokasi anggaran fungsi pada pendidikan yang disalurkan melalui kementerian atau lembaga pemerintah, alokasi anggaran pendidikan ke daerah. Kebijakan dalam realisasi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (anggaran pendidikan) akan memberi pengaruh yang positif dan

meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari sisi pendidikan memiliki faktor pendukung agar memiliki kualitas mutu pembelajaran yang baik, salah satu faktornya yaitu pembiayaan pendidikan yang merupakan sebuah anggaran. Anggaran pendidikan merupakan satu faktor pendukung dalam meningkatkan fasilitas dalam pelaksanaan segala ketentuan dan program sekolah, dan dapat meningkatkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah berperan untuk meningkatkan proses pembelajarannya dan pemerintah pusat maupun daerah terus meningkatkan biaya pendidikan. Biaya anggaran pendidikan tidak hanya sebesar anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan dengan baik, tetapi juga penggunaan biaya secara efektif dan efisien untuk mencapai manfaat sekolah yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran di sisi pendidikan diharapkan menjadi dorongan dalam pembaharuan di setiap system pendidikan yang digunakan mulai dari visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional guna menjadikan pendidikan yang lebih meningkat.

1.8.1 Dampak Anggaran Pendidikan

Menurut Arifi (2008 : 118) Adapun dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses dan hasil belajar dapat diukur sebagaimana asumsi sebagai berikut:

1. Pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang baik secara sosial maupun ekonomis. Nilai pendidikan berupa aset moral adalah bentuk kemampuan, kecakapan, ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan dipandang sebagai suatu investasi.
2. Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu.
3. Indikator penting yang dapat berpengaruh pada mutu atau kualitas pendidikan di antaranya adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan dan alat-alat bantu proses belajar mengajar yang belum memadai.

1.9 Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan merupakan anggaran yang di terapkan oleh pemerintahan untuk mendanai segala kebutuhan dalam bidang kesehatan. Salah satu komponen IPM adalah kesehatan dengan indikatornya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan produktifitas masyarakat terutama yang bekerja. Hal ini tentunya juga sangat berpengaruh baik pada perbaikan kesejahteraan masyarakat yang nantinya tercermin dengan meningkatnya AHH di suatu daerah. Di sisi lain, belanja kesehatan per kapita yang tinggi tidak menyebabkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) juga tinggi.

1.9.1 Tujuan anggaran kesehatan

Tujuan anggaran kesehatan dalam Pasal 170 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan "Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil & termanfaatkan secara berhasil & berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dialokasikannya anggaran kesehatan oleh pemerintahan pusat juga berdasarkan kebutuhan yang di perlukan daerah untuk menjaga tetap tersalurkan dana dalam mengatasi masalah yang terjadi pada bidang kesehatan.

1.10 Hubungan Antar Variabel Penelitian

1.10.1 Hubungan Variabel Pendapatan Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan per kapita Menurut Tarigan dalam Hanum (2019 : 86) adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Kenaikan pendapatan perkapita menjadi salah satu impian pemerintahan untuk mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia.

Pendapatan per kapita biasa dikatakan sebagai perbandingan antara pendapatan total yang diterima per masyarakat dari besarnya pendapatan nasional dengan jumlah penduduk yang ada. Menurut penelitian Ryan (2013) Pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap ndeks pembangunan manusia karena gambaran besarnya rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses yang terjadi di suatu daerah menunjukkan semakin banyak penerimaan ekonomi di suatu daerah akan menimbulkan peningkatan komponen IPM, jika perekonomian penduduk baik maka akan membantu negara dalam pembangunan ekonomi.

Besarnya pendapatan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dilihat dari daya beli masyarakat yang tinggi seperti yang diketahui bahwa IPM merupakan suatu indeks yang menunjukkan tingkat kesejahteraan manusia dan pendapatan perkapita merupakan komponen yang mendukung terciptanya pembangunan yang baik sehingga Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya.

1.10.2 Hubungan Variabel Anggaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Rata-rata pendidikan merupakan yang dapat dilihat untuk menentukan suksesnya sebuah pembangunan manusia di suatu negara. Menurut darmayanti (2019) Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan oleh masyarakat. Penyediaan fasilitas pendidikan dasar merupakan prioritas utama bagi semua negara-negara berkembang dan menjadi hal terpenting dalam penentuan tingkat kegagalan pendidikan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakatnya yang sering disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia.

Astri, Meylina (2013 : 80) mengatakan bahwa :

Ranah pembangunan manusia melalui sektor pendidikan turut dipertimbangkan, karena melalui pendidikan manusia mengalami sebuah proses. Proses tersebut dilalui oleh manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan/keahlian, meningkatkan kreativitas ataupun inovasi yang keseluruhannya dapat meningkatkan harkat dan martabat setiap individu. Apabila kualitas sumber daya manusia tersebut rendah yang tercermin adalah tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah pula yang tentunya berpengaruh juga pada pembangunan manusia.

Guna meningkatkan kesuksesan pendidikan, diperlukan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan dalam kinerjanya. Apabila besarnya anggaran yang dikeluarkan memenuhi kebutuhan pendidikan yang baik maka akan mendorong sumber daya manusia yang berkualitas. Didukung dengan Penelitian tentang pembangunan manusia atau IPM juga pernah dilakukan di Indonesia. Astri et. al (2013 : 99) menemukan bahwa terdapat pengaruh

pengeluaran pemerintah daerah dalam anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM secara bersamaan.

1.10.3 Hubungan Variabel Anggaran Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kesehatan yang didefinisikan oleh World Health Organization (WHO) adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, yang mulanya dimaksud sehat hanya sehat fisik, psikis, sosial, dan bebas dari kecacatan, sekarang telah ditambah dengan sehat secara spiritual dimana jika modal manusia rendah, menyiratkan harapan hidup yang rendah.

Hasanah & Ahmadi (2017) dalam Insyirah (208 : 22) berpendapat bahwa “Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental”. Tingkat kesehatan rata-rata manusia akan disertakan dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan suatu negara dalam memenuhi semua keperluan yang akan disalurkan seefisien mungkin.

Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara atau suatu daerah. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan universal. Kualitas SDM yang tinggi mencerminkan derajat kesehatan seseorang yang tinggi pula sehingga akan berdampak pada peningkatan pembangunan manusia. Maka dari itu, peran pemerintah dalam alokasi anggaran dibidang kesehatan sangat diperlukan. (Ramadanisa 2022)

1.11 Penelitian Terdahulu

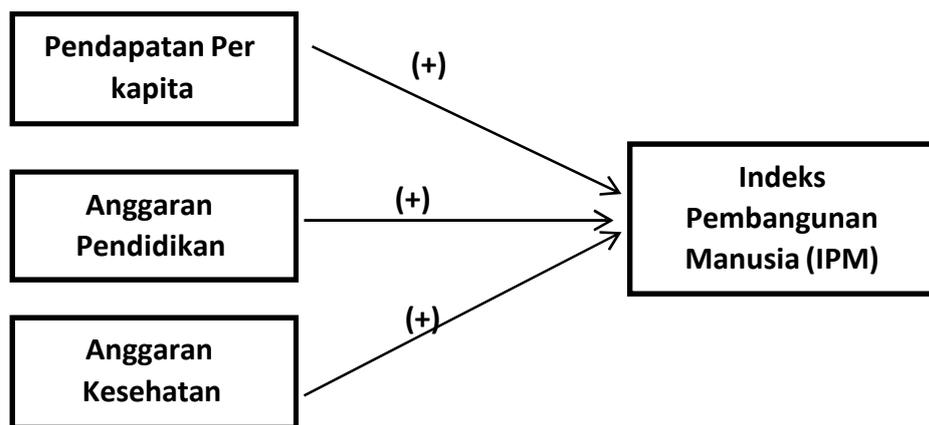
Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Insyirah H.P Muhammad (2018)	Pengaruh PDRB, Anggaran Kesehatan, Anggaran Pendidikan, Dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2016)	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi yang menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh secara positif terhadap IPM dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0477 yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan, variabel anggaran pendidikan berpengaruh secara positif terhadap IPM dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0063 yang berarti anggaran pendidikan memiliki hubungan yang positif dan signifikan, dan variabel anggaran kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0063.
2.	Lengkong Ketsy, Rotinsulu, Walewangko (2019)	Pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kota Bitung.	Pada penelitian ini digunakan metode analisis path. Untuk anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan mempunyai korelasi atau hubungan yang positif dan signifikan dengan

			pembangunan manusia yang ada di Kota Bitung.
3.	Sabrina sheila (2019)	Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2018	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Index Pembangunan Manusia di Indonesia. Sedangkan sector kesehatan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4.	Winarti Astri (2014)	Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 1992-2012	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

			Indonesia, sedangkan variabel anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
--	--	--	--

1.12 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

1.13 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dalam penelitian terhadap masalah yang ditemukan yang kebenarannya harus diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2000-2021.
2. Anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2000-2021.
3. Anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2000-2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Indonesia, dengan pendekatan yang diambil untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan per kapita, anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2000-2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data pendapatan per kapita Indonesia tahun 2000-2021
2. Data anggaran pendidikan di Indonesia tahun 2020-2021
3. Data anggaran kesehatan Indonesia tahun 2000-2021
4. Data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2000-2021

3.3 Model Analisis

3.3.1. Model Kuantitatif

Metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, anggaran kesehatan, dan anggaran pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2000-2021 adalah metode analisis kuantitatif.

Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang menggunakan data berupa angka-angka untuk menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian dengan menggunakan model regresi linier berganda.

3.3.2 Pendugaan Model Ekonometrik

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaannya regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{Q} + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + s_i; \quad i = 1, 2, 3, \dots n.$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

\hat{Q} = Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi (statistik)

X₁ = Pendapatan per kapita Indonesia (juta rupiah)

X₂ = Anggaran Pendidikan Indonesia (miliar rupiah)

X₃ = Anggaran Kesehatan Indonesia (miliar rupiah)

s_i = Galat (*Error Term*)

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

1. Pendapatan per kapita Indonesia (X_1)

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya pendapatan per kapita Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2000-2021.

$H_1 : \beta_1 > 0$, artinya pendapatan per kapita Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2000-2021.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :
$$t_h = \frac{\hat{\beta} - \beta_1}{S(\hat{\beta})}$$

Keterangan :

β_1 : Koefisien regresi

β_1 : Parameter

$S(\beta_1)$: Simpangan Baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya pendapatan per kapita Indonesia secara parsial berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan Indonesia. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya pendapatan per kapita Indonesia secara parsial tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

2. Anggaran Pendidikan Indonesia (X_2)

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya anggaran pendidikan Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2000-2021.

$H_1 = \beta_2 > 0$, artinya anggaran pendidikan Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2000-2021.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah : $t_h = \frac{\hat{\beta} - \beta_2}{S(\hat{\beta})}$

Keterangan :

β_2 : Koefisien regresi

β_2 : Parameter

$S(\beta_2)$: Simpangan Baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya anggaran kesehatan Indonesia secara parsial berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan Indonesia tahun 2000-2021. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya anggaran kesehatan Indonesia secara parsial tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2000-2021.

3. Anggaran kesehatan Indonesia (X_3)

$H_0 : \beta_3 = 0$, artinya anggaran kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2000-2021.

$H_1 : \beta_3 > 0$, artinya anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2000-2021.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah : $t_h = \frac{\hat{\beta} - \beta_3}{S(\hat{\beta})}$

Keterangan :

$\hat{\beta}_3$: Koefisien regresi

β_3 : Parameter

$S(\hat{\beta}_3)$: Simpangan Baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya anggaran pendidikan Indonesia secara parsial berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan Indonesia pada tahun 2000-2021. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya anggaran pendidikan Indonesia secara parsial tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2000-2021.

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui apakah variable independen (pendapatan per kapita, anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan di Indonesia) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variable dependen (indeks pembangunan manusia). Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikannya. Apabila nilai *probability* < α maka

koefisien variable tersebut signifikan mempengaruhi variable terikat dan sebaliknya. Penguji terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji-t dengan derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai *probability* statistik $< 0.05 \%$ maka H_0 ditolak H_1 diterima
2. Jika nilai *probability* statistik $> 0.05 \%$ maka H_0 diterima H_1 ditolak

3.4.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji “F” digunakan untuk mengetahui proporsi variable terikat yang dijelaskan variable bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variable-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variable terikat secara bersama-sama atau tidak adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

- a. Membuat hipotesis nol (H_0) Dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ berarti variabel bebas secara serempak atau keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$H_1: \beta_i$ tidak semua nol , $i = 1,2,3$, berarti variabel bebas secara serentak dan keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk numerator (k-1) dan df untuk denominator (n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya Koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.4.3. Uji kebaikan Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Uji kebaikan suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan suai model yang digunakan koefisien determinasi R^2 Untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$; $R^2 \rightarrow 1$ artinya semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.

3.4.4. Uji penyimpangan asumsi klasik

3.4.4.1. Multikolinearitas

Ghozali (2018 : 107) menyatakan bahwa “uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang

tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas.

Ada beberapa cara untuk mengetahui keberadaan multikolinearitas dalam suatu model regresi :

1. Menganalisis matriks korelasi. Jika antara dua atau lebih variabel independent memiliki korelasi yang cukup tinggi, biasanya di atas 0,9 maka hal tersebut mengindikasikan terjadinya multikolinearitas.
2. VIF (Variance Inflation Factor) adalah salah satu cara dalam mendeteksi adanya multikolinearitas, dan dalam penulisan ini menggunakan nilai Tolerance atau VIF. Multikolinearitas dalam sebuah regresi dapat diketahui apabila nilai $VIF \geq 10$.
3. TOL (Tolerance) Jika nilai Tolerance kurang dari 0,1 atau nilai VIF melebihi 10 maka hal tersebut menunjukkan bahwa multikolinearitas adalah masalah yang pasti terjadi antar variabel bebas.

Menurut Santoso (2012 : 234) “Jika terbukti ada multikolinearitas, sebaiknya salah satu dari variabel independent yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali”. Efek multikolinearitas dapat menjadikan nilai model tidak dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependent dan variabel independent secara baik. Keberadaan multikolinearitas

akan menyebabkan varians parameter yang diestimasi akan menjadi lebih besar dari yang seharusnya dengan demikian tingkat akurasi dari estimasi akan menurun (Sukmono, 2014).

3.4.5 Uji Autokorelasi

1. Uji Durbin-Watson

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar sesama sampel atau data pengamatan yang di urutkan berdasarkan waktu. Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. (Ghozali, 2018)

Cara menguji keberadaan autokorelasi yaitu dengan uji : Durbin Watson (uji D – W). Uji ini dilakukan dengan membandingkan DW_{hitung} dengan DW_{tabel} . Jika terlihat adanya terjadi autokorelasi maka galat yang dihasilkan tidak lagi minim sehingga penduga parameter tidak lagi efisien.

Adapun beberapa asumsi yang melandasi Uji Durbin-Watson ini antara lain :

1. Uji Durbin-Watson diterapkan untuk model regresi yang mencakup parameter β_0 , dengan kata lain dipergunakan untuk model regresi yang mengandung intersep.
2. Model regresi tidak mencakup nilai-nilai lag dari variabel tak bebas sebagai suatu variabel penjelas.
3. Variabel-variabel penjelas X, adalah nonstokastik, atau bersifat tetap dalam penarikan contoh yang berulang (*repeated sampling*).

Uji Durbin-Watson menggunakan rumus sebagai berikut :

- Angka D – W dibawah -2 yang berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D – W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Angka D – W diatas +2 berarti ada autokorelasi yang negatif.



Gambar 3.1 : Statistik Uji Durbin-Watson

2. Uji Runs

Uji runs dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam model yang digunakan uji run. Uji run merupakan salah satu uji statistic nonparametrik. Prosedur run test ini dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel acak. Uji ini juga dapat digunakan untuk melihat apakah observasi (sampel) yang diambil secara random. Uji runs juga dilakukan jika semata-mata pada uji D – W hasil yang ditunjukkan tidak mendapatkan kesimpulan atau hasil yang masih ragu-ragu.

Cara yang digunakan dalam uji run adalah sebagai berikut.

H_0 : Galat (res_1) random (acak)

H_1 : Galat tidak menyebar normal

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ berarti galat menyebar secara acak.

3.4.6 Uji Normalitas

Data normal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan inferensi statistik. Uji normalitas dilakukan sebagai salah satu bentuk uji untuk melihat seberapa normal data pada sampel menyebar atau bahkan data yang ada tidak membuat model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran yang tidak normal. Gauss Markov dalam Panjaitan (2022 : 37) Menyatakan : “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal.

Penggunaan uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan dan uji statistik”.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel Dependen yang merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan pendapatan per kapita merupakan variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel lain dalam penggunaannya. Adapun definisi operasional variabel sebagai berikut :

A. Variabel Dependen

Variabel yang dijadikan sebagai variabel dependen adalah Indeks Pembangunan Manusia atau (IPM). Indikator yang mampu mendorong

tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas meliputi 3 indikator penting yaitu pendapatan per kapita, pendidikan, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Dalam penelitian ini adalah IPM Indonesia tahun 2000-2021. Sumber data yang diperoleh dan diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS).

B. Variabel Independen

1. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi antara PDB harga berlaku dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah/tahun.

2. Anggaran pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan besaran pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diyakini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas, dengan satuan miliar rupiah/tahun.

3. Anggaran kesehatan

Anggaran kesehatan merupakan besaran pengeluaran pemerintah atas bidang kesehatan

guna memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait hal – hal yang dibutuhkan dalam meningkatkan angka kesehatan yang semakin baik, dengan satuan miliar rupiah/tahun.